

SKRIPSI

**PERAN SANIRI NEGERI DALAM PELAKSANAAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI NEGERI AMAHAI
KABUPATEN MALUKU TENGAH**



**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2024

**PERAN SANIRI NEGERI DALAM PELAKSANAAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI NEGERI AMAHAI
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi guna memenuhi salah
satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 dalam Ilmu
Komunikasi**



**Disusun oleh :
Alex Irwanto Salasa
19.M1.0065**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Alex Irwanto Salasa
Universitas Katolik Soegijapranata
2024

Informasi menjadi hal yang penting bagi setiap aspek kehidupan masyarakat, salah satunya kehidupan bermasyarakat di Negeri Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Layanan informasi publik dalam kehidupan masyarakat di suatu lingkungan pemerintahan menjadi acuan bagi masyarakat dalam menilai kinerja dari pemerintahan yang ada lingkungan masyarakat. Instansi yang ada di suatu lingkungan sangat berperan penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat lewat layanan informasi publik yang dapat diakses oleh setiap masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Saniri Negeri Amahai dalam melaksanakan layanan informasi kepada masyarakat. Metode pada penelitian ini adalah kualitatif eksploratif. Dengan teknik pengambilan data berupa wawancara dengan narasumber yaitu Sekertaris Saniri Negeri Amahai dan Ketua Saniri Negeri Amahai, observasi dan dokumentasi. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran Saniri Negeri dalam melaksanakan layanan informasi publik di negeri Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Saniri Negeri Amahai sebagai lembaga tertinggi desa yang berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Peran dari Saniri Negeri Amahai dalam mengawasi jalannya pemerintahan negeri disampaikan lewat layanan informasi yang dilaksanakan Saniri Negeri secara transparan. Dalam pelaksanaannya, Saniri Negeri juga melaksanakan layanan informasi terhadap masyarakat di Negeri Amahai serta kategori informasi yang disediakan oleh Saniri Negeri mengikuti pedoman informasi yang wajib disediakan setiap sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik.

Kata Kunci: Saniri Negeri, Negeri Amahai, Informasi Publik, Peran Saniri Negeri, UU No. 14 Tahun 2008

ABSTRACT

Alex Irwanto Salasa
Soegijapranta Catholic University
2024

Information becomes essential to every aspect of society's life, one of its community life in the land of the central maluku district. Public information services in people's lives in a government environment become a benchmark for people to assess the performance of any existing government. An institution that exists in a ward plays a major role in delivering information to communities through public information services that can be accessed by any community. Therefore the study is intended to know the role of saniri of the state Amahai in performing information services to the public. The method of this research is qualitatively exploratory. With the data taken techniques, interviews with sources. The government's secretary Negeri Amahai and saniri's top secretary of state Saniri Amahai, observation and documentation. The problem with this research is how saniri countries play their role in carrying out public information services in the country of the central Maluku district. Saniri of the Negeri Amahai as the village's awarding society performs according to its host and channeling of public aspirations. The role of the state Saniri Amahai controlling the way of state government was transmitted through information services conducted by Saniri Amahai through transparency. In the process, the state Saniri also performs information services on communities in the land of Amahai, as well as information categories provided by Saniri countries follow mandatory guidelines of information provided in accordance with the 2008 no. 14 law on public openness.

Key words: Saniri Country, Amahai Country, Public Information, Saniri Country role, 2008 law no. 14.